

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Manusia merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan, maka dari itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini juga berlaku pada birokrasi pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak birokrasi pemerintahan dituntut untuk turut melakukan peningkatan kompetensi dirinya. Kewajiban pengembangan kompetensi seorang ASN diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana dikatakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN untuk memastikan dan memelihara kualitas pegawai agar dapat optimal dalam menjalankan tugas organisasi. Salah satu pelaksanaan kompetensi ASN bisa dilakukan melalui skema pendidikan yakni dengan tugas belajar dan izin belajar. Dengan adanya kebutuhan tentang pengembangan kompetensi ASN tersebut Kementerian CDF menugaskan pegawainya sejumlah 100 pegawai untuk mendaftarkan diri pada program beasiswa LPDP tahap I tahun 2023.

Perusahaan ABC merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam memberikan layanan bimbingan pendidikan secara digital bagi para kalangan pelajar maupun profesional yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Pada pertengahan tahun 2022 Perusahaan ABC dihubungi oleh pihak Kementerian CDF untuk bekerjasama dalam penyediaan jasa bimbingan belajar untuk persiapan pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap I melalui media

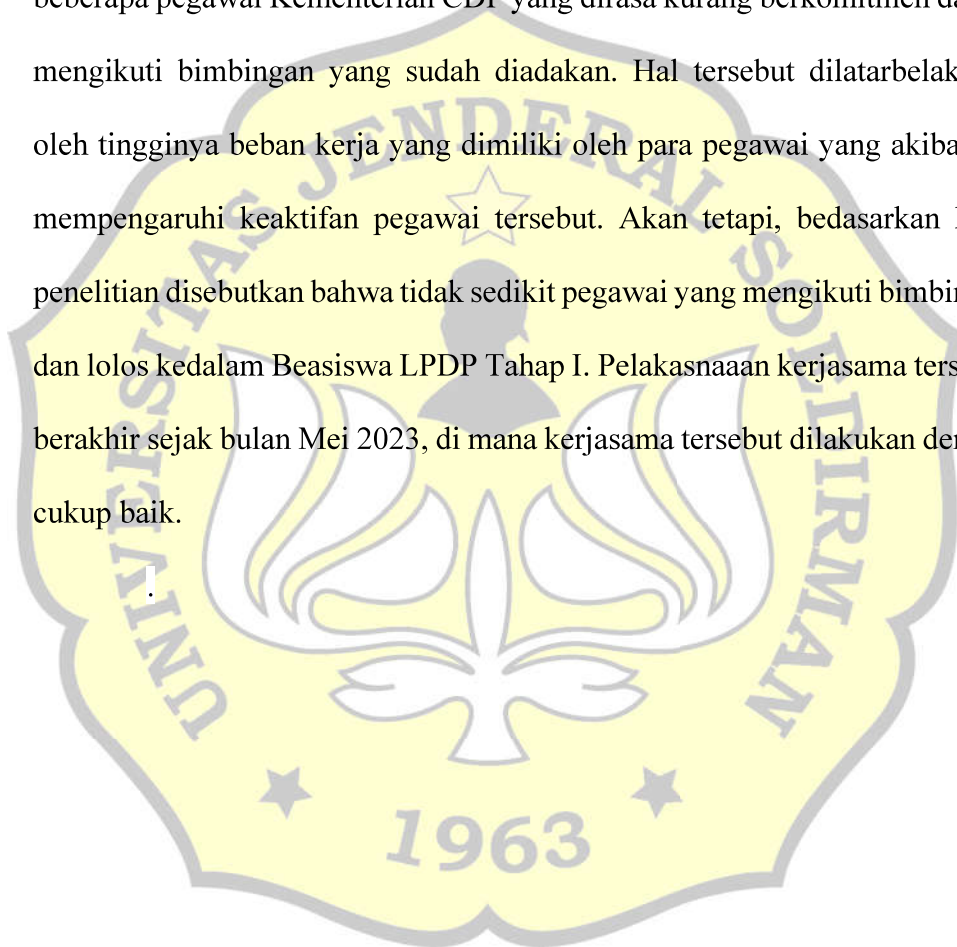
sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, diskusi antara Perusahaan ABC dan Kementerian CDF berlanjut hingga ke tahap kesepakatan.

Kerjasama antara Perusahaan ABC dengan Kementerian CDF ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dengan Penunjukan Langsung. Pelaksanaan Penunjukan Langsung (PL) dilakukan dengan cara melakukan penunjukan terhadap satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai agenda negosiasi harga dan teknis pelaksanaan. Penunjukan Langsung (PL) merupakan mekanisme Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam kondisi tertentu yang bernilai paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, proses perundingan kesepakatan berlangsung cepat. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor Kementerian CDF yang memiliki kepentingan tinggi dalam memenuhi kewajiban para ASN -nya untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan. Perusahaan ABC hanya perlu melampirkan dokumen-dokumen tertentu sebagai persyaratan kualifikasi mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Pada proses pelaksanaan kerjasama, Kementerian CDF memilih program pelatihan IELTS Academy dan Study Abroad Academy dengan tujuan para pegawai mampu kedalam program Beasiswa LPDP Tahap I. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Kementerian CDF melakukan penambahan jumlah pegawai untuk mengikuti bimbingan IELTS *Academy* dan *Study Abroad Academy*. Hal terjadinya kerjasama antara Perusahaan

ABC dengan Kementerian CDF dilatarbelakangi dengan kebutuhan yang tinggi dari Kementerian CDF serta rasa puas dari hasil kerjasama yang sedang berjalan tersebut.

Namun, pada pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang membuat bimbingan yang diberikan mengeluarkan hasil yang kurang optimal. Terdapat beberapa pegawai Kementerian CDF yang dirasa kurang berkomitmen dalam mengikuti bimbingan yang sudah diadakan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya beban kerja yang dimiliki oleh para pegawai yang akibatnya mempengaruhi keaktifan pegawai tersebut. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa tidak sedikit pegawai yang mengikuti bimbingan dan lolos kedalam Beasiswa LPDP Tahap I. Pelaksanaan kerjasama tersebut berakhir sejak bulan Mei 2023, di mana kerjasama tersebut dilakukan dengan cukup baik.



5.2 Implikasi

Merujuk hasil kesimpulan penelitian Model *Public Private Partnership* Perusahaan ABC pada Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga-Lembaga Publik (Studi Kasus pada Persiapan Pengembangan Kompetensi ASN di Kementerian CDF), implikasi sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk teknis serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam bentuk *action plan* kegiatan dengan tujuan dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
2. Mengoptimalkan kegiatan kerjasama dengan mempersiapkan dan menyesuaikan beban kerja SDM agar dapat mengikuti kegiatan secara maksimal.
3. Memberikan *feedback* serta evaluasi khusus dalam pelaksanaan kegiatan agar hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat dicegah di kemudian hari.